

Apakah perubahan *Excise Subsidy* menjadi *Cash Grant* membantu petani kecil?

Whether or not the replacement of Excise Subsidy with Cash Grant benefits small farmers?

Anas Zaini

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian – UNRAM

Abstrak

Pemberian subsidi BBM selama ini dianggap salah sasaran karena lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu pemerintah menggantinya dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin termasuk rumah tangga petani kecil dan melepaskan harga minyak dalam negeri mengikuti harga dunia. Dengan menggunakan indikator nilai tukar petani diperoleh hasil bahwa kebijakan tersebut bukan saja gagal mempertahankan status kemakmuran petani tetapi justru berakibat kontra produktif bagi upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan. Program pembangunan ekonomi yang sebelumnya menyebabkan nilai tukar petani menurun 2,23 % per tahun mengalami percepatan penurunan menjadi 13,5 % untuk rumah tangga petani dan 21,4 % untuk rumah tangga buruh tani setelah pemerintah mengganti kebijakan *excise subsidy* dengan BLT.

Kata kunci: subsidi, bantuan langsung tunai, nilai tukar petani

Abstract

Subsidy on oils is assumed to reach wrong target since it is received mainly by middle and upper class of society. The government therefore replaced it with cash grant given to poor households including small farmers and freed the domestic price of oils to follow its counterpart world price. By utilizing farmer terms of trade as an indicator of welfare change it can be concluded that the replacement policy was not only fail to maintain the welfare of farmer but more than that it was also unproductive to the government's efforts in reducing poverty. Economic development program that caused farmer terms of trade to be down 2.23 % per year has experienced progressive decline to reach 13.5 % per year for farmer households and 21.4 % per year for farm labor households since the government replaced excise subsidy with cash grant.

Key words: excise subsidy, cash grant, farmer terms of trade

Pendahuluan

Latar belakang

Masyarakat petani khususnya petani kecil merupakan bagian dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain nilai tukar yang diterima petani rendah, menurut Prayitno dan Arsyad (1987) juga disebabkan oleh luas lahan usahatani yang sempit, dikelola dengan teknologi sederhana dan peralatan yang terbatas. Rendahnya pendapatan petani berakibat pada rendahnya kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Kenyataan ini menambah kompleksitas persoalan kemiskinan di perdesaan.

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas yang paling utama. Jumlah rumahtangga yang termasuk kategori miskin pada tahun 2005 sebanyak 15 juta rumahtangga, yang terdiri dari sangat miskin (pendapatan kurang dari Rp. 480.000 per bulan) sebanyak 4 juta, miskin (pendapatan kurang dari Rp. 600.000 per bulan) sebanyak 6 juta, dan hampir miskin (pendapatan kurang dari Rp. 700.000 per bulan) sebanyak 5 juta rumahtangga.

Program utama yang dicanangkan itu meliputi penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan budaya usaha. Namun mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, maka dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan strategi penanggulangan yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektoral seperti penciptaan stabilitas politik dan keamanan, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan pelayanan kesehatan dan kependudukan, perluasan akses bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi terhadap sumber pembiayaan, teknologi dan pasar serta percepatan pembangunan pedesaan.

Salah satu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan termasuk kemiskinan di perdesaan adalah pemberian subsidi terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selama ini subsidi pemerintah terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipandang salah sasaran, hal ini dikarenakan sebagian besar subsidi tersebut dinikmati oleh masyarakat menengah keatas. Oleh karena itu salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan merubah *excise subsidy* menjadi bantuan langsung tunai (*cash grant*) kepada penduduk miskin termasuk untuk rumahtangga petani kecil.

Sejak 1 Oktober 2005 bantuan program tersebut diberikan kepada rumah tangga miskin dengan pendapatan per kapita kurang dari Rp. 150.000 per bulan, dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumahtangga miskin sebagai dampak dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak.

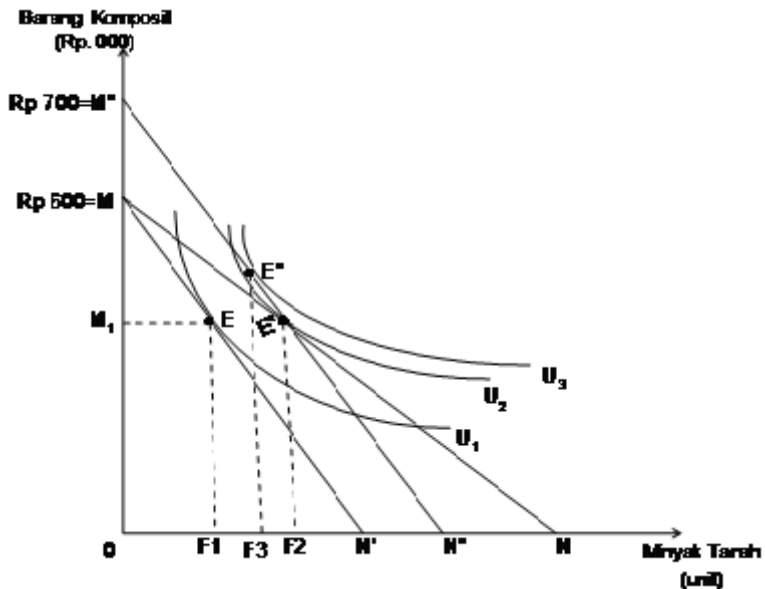
Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara langsung akan meningkatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa termasuk harga barang/jasa yang dibutuhkan dan barang/jasa yang dihasilkan rumahtangga petani. Untuk melihat keberhasilan

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam menjaga daya beli rumah tangga petani kecil dari dampak inflator kenaikan harga bahan bakar minyak, maka perlu dilakukan kajian program BLT tersebut dalam mempertahankan kemakmuran petani.

Kerangka dasar teori

Teori pilihan konsumen

Dampak kemakmuran dari pengalihan bentuk subsidi untuk rumah tangga miskin dari *excise subsidy* menjadi *cash grant* secara teoritis dapat dijelaskan dengan bantuan teori pilihan konsumen (*Consumer Choice Theory*). Dengan *excise subsidy*, konsumen hanya membayar sebagian dari harga BBM (minyak tanah) per unit dari barang tersebut dan selebihnya dibayar pemerintah. Total subsidi yang harus dibayarkan pemerintah dengan demikian adalah sebesar selisih harga dikalikan dengan total konsumsi barang tersebut (Browning and Browning, 1992). Dengan Bantuan Langsung Tunai (*Cash Grant*), pemerintah memberikan transfer pendapatan sejumlah tertentu (dalam hal ini Rp. 100.000 per bulan per KK) dan rumah tangga memiliki banyak pilihan untuk menggunakan bantuan langsung tersebut. Dalam hal pengalihan subsidi BBM --terutama minyak tanah yang merupakan bahan bakar yang paling banyak dikonsumsi rumah tangga petani kecil-- dari *excise subsidy* ke *cash grant* sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM maka dampak kebijakan tersebut bagi rumah tangga miskin adalah positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1. *Cash Grant* menyebabkan penduduk miskin semakin makmur dibanding dengan pemberian *excise subsidy*

Pemerintah menetapkan kategori rumahtangga miskin yang berhak memperoleh bantuan langsung tunai (*cash grant*) adalah rumahtangga dengan penghasilan per kapita kurang dari Rp. 150.000 per bulan atau jika memiliki jumlah anggota keluarga 4 orang maka penghasilan rumahtangga tidak lebih dari Rp. 600.000 per bulan. Dengan harga BBM (minyak tanah merupakan konsumsi energi penting bagi rumahtangga miskin) sebelum kenaikan maka garis anggaran rumahtangga tersebut dinyatakan oleh garis anggaran (*budget line*) MN dan keseimbangan konsumsi berada pada titik E' pada kurva utiliti U_2 .

Setelah kenaikan harga minyak maka garis anggaran ditunjukkan oleh garis MN' dengan keseimbangan konsumsi pada titik E pada kurva utiliti U_1 yang berada di bawah U_2 . Artinya tingkat kemakmuran rumahtangga miskin menurun dengan kenaikan harga BBM (khususnya harga minyak tanah). Oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan tunai langsung (*cash grant*) sebesar Rp. 100.000 per bulan sehingga garis anggaran menjadi M"N" dan keseimbangan konsumsi berada di titik E" yang lebih tinggi dari kondisi semula karena berada pada kurva utiliti U_3 .

Dari segi konsumsi, dengan kebijakan menaikkan harga ini konsumsi minyak tanah oleh rumahtangga miskin berkurang sebesar F2-F3 dan itu berarti konsumsi BBM dalam negeri secara total pun menurun sehingga subsidi BBM dalam APBN semakin kecil tanpa mengorbankan kemakmuran rumahtangga miskin.

Keadaan di atas merupakan ekspektasi pemerintah dan hanya bisa terjadi pada kondisi statik dimana harga barang lain tetap. Pada kenyataannya setiap kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga barang-barang lain melalui kenaikan biaya produksi dan distribusi. Oleh karena itu program pemberian BLT sebagai mekanisme kompensasi dari pengurangan subsidi BBM masih perlu diuji dengan melihat perkembangan harga-harga barang lain. Dalam konteks rumahtangga petani maka perlu dianalisis perbandingan laju kenaikan harga barang yang dibeli petani dengan laju kenaikan harga barang yang dihasilkan petani. Perbandingan dua angka indeks ini digunakan untuk mengetahui perkembangan status kemakmuran rumahtangga petani akibat kebijakan tertentu atau dari waktu ke waktu.

Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak

Subsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Kebijakan subsidi dapat berupa subsidi harga (*price subsidy*) atau subsidi langsung kepada penduduk miskin (*direct subsidy*). Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap harga BBM merupakan salah satu bentuk subsidi terhadap harga. Lebih lanjut, subsidi tersebut dipandang salah sasaran, sebab sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh masyarakat menengah keatas. Oleh karena itu sejak tahun 2000, pemerintah menetapkan kebijakan pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk subsidi langsung kepada penduduk miskin (Anonim, 2005). Kebijakan tersebut pada tahun 2000 dikenal dengan Dana Kompensasi Sosial (DKS), tahun 2001 program yang sama dikenal dengan nama Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE).

Sejak tahun 2002, pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk subsidi langsung kepada penduduk/keluarga miskin dikenal dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM). Pada tahun 2005 harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami 2 kali kenaikan yaitu 1 Maret dan 1 Oktober sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipasar dunia. Adapun Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) tahun 2005 difokuskan pada empat program yaitu (Anonim, 2005):

1. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) diberikan kepada anak usia sekolah, terutama yang berasal dari keluarga miskin dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Program ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
2. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM)
Program ini merupakan program pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan pengobatan di Puskesmas atau Rumah Sakit dengan prioritas utama diberikan kepada penduduk atau keluarga miskin. Pelaksanaannya diberikan oleh Departemen Kesehatan.
3. Program Infrastruktur Pedesaan (IP)
Program infrastruktur di pedesaan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin di pedesaan dalam memenuhi kebutuhan jalan, jembatan desa, tambatan perahu, perahu, irigasi dan air minum dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan kemudahan aksesibilitas tersebut diharapkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal di masyarakat pedesaan meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
4. Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai dampak dari pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Program ini dilaksanakan oleh Departemen Sosial.

Petani dan kemiskinan

Penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (2001) didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan hidup secara layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan.

Menurut Salim (1984), kemiskinan adalah kekurangan pendapatan dari sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Selanjutnya dikatakan bahwa orang miskin memiliki lima ciri yaitu:

1. Pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, tidak sempat menyelesaikan sekolah dasar, waktu yang tersedia habis tersita untuk mencari nafkah.
4. Bagi yang tinggal di pedesaan, banyak yang tidak memiliki tanah, walaupun ada maka kecil sekali, kebanyakan menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian.
5. Bagi yang tinggal di perkotaan, masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan kota kebanyakan di negara berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa.

Kemiskinan yang terdapat di Indonesia tidak seperti yang terdapat di negara lain. Sebagian besar kemiskinan di Indonesia terdapat di daerah pedesaan yaitu petani yang tidak memiliki tanah dan kepemilikannya sangat sempit serta letaknya terpencar-pencar, kondisi alamnya banyak memberikan kesulitan, seperti kesuburan tanah yang rendah, kecilnya curah hujan dan bentukan wikayah yang tidak menguntungkan (Hanapiah,1981).

Selain itu dilihat dari ciri-ciri kemiskinan di daerah pedesaan, posisi petani dapat dilihat dalam struktur masyarakat secara umum seperti (Rostiani, 1995):

1. Rumah tangga yang anggotanya bekerja di sektor pertanian dan mereka menguasai tanah yang sangat marginal, tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Pengeluaran rumah tangga adalah untuk konsumsi makanan
3. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar sektor pertanian
4. Kesenambungan kerja kurang terjamin, karena mereka bekerja sebagai buruh musiman dengan upah yang sangat rendah.

Lebih lanjut dikatakan kemiskinan petani di Indonesia disebabkan oleh besarnya pertambahan penduduk dikalangan petani itu sendiri dan pertambahan penduduk yang pesat tersebut tidak dapat ditampung oleh sektor perekonomian desa maupun pasar tenaga kerja perkotaan. Konsekuensinya petani tetap tinggal di desa-desa dengan kesempatan kerja dan sumberdaya yang kurang atau terbatas, akibatnya kemiskinan petani semakin tampak (Hanapiah,1981). Karakteristik kemiskinan lainnya ditandai dengan pengangguran, produktivitas dan pendapatan yang rendah, kurangnya fasilitas dan pelayanan sosial serta kemiskinan yang meluas.

Metoda penelitian

Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai laporan dan publikasi seperti Badan Pusat Statistik dan Skripsi mahasiswa. Hal ini dilakukan bukan saja demi pertimbangan efisiensi namun sumber

data yang disebut pertama tersebut (BPS) sering digunakan sebagai acuan pemerintah dalam setiap penyusunan suatu kebijakan. Oleh karena itu dengan menggunakan sumber data yang sama maka perdebatan mengenai validitas data bila memberikan hasil yang kontradiktif dapat dihilangkan.

Untuk keperluan pendalaman analisis digunakan data Kabupaten Lombok Timur dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki jumlah rumah tangga miskin termasuk petani kecil terbanyak di Nusa Tenggara Barat (BPS, 2005).

Teknik analisis

Perubahan tingkat kemakmuran petani diukur dengan menggunakan angka indeks nilai tukar petani (*farmer term of trade*) yang merupakan perbandingan indeks harga barang atau jasa yang dihasilkan petani atau buruh tani dengan indeks harga barang yang diperlukan petani atau buruh tani. Dalam analisis digunakan tahun 2005 sebagai tahun dasar karena pengumuman pengalihan bentuk subsidi BBM dilakukan pada tahun tersebut yaitu 1 Oktober 2005 dan dampaknya diukur satu tahun berikutnya yaitu Oktober 2006.

Indeks harga

Penghitungan indeks harga baik untuk yang diterima (IT) maupun untuk yang dibayar (IB) petani dilakukan dengan menggunakan formula *Indeks Paasche* yaitu :

$$I = \frac{\sum P_n \cdot Q_n}{\sum P_o \cdot Q_n} \times 100$$

dimana :

- I = Indeks harga
- P_n = Harga pada tahun berjalan (ketika penelitian 2006)
- P_o = Harga pada tahun dasar, sebelum kenaikan BBM (2005)
- Q_n = Kuantitas pada tahun berjalan (2006)

Nilai tukar petani (NTP)

Untuk menganalisis Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan formula sebagai berikut:

$$NTP = \frac{IT}{IB} \times 100$$

Dimana :

- NTP = Nilai tukar petani
- IT = Indeks harga yang diterima petani
- IB = Indeks harga yang dibayar petani

Hasil dan pembahasan

Perubahan kemakmuran petani dengan *excise subsidy*

Salah satu indikator penting yang mengukur perubahan status kemakmuran petani adalah dengan penggunaan angka indeks nilai tukar petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga barang yang di terima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani serta barang untuk keperluan produksi pertanian.

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat indeks harga barang yang diterima petani antara tahun 2000 hingga 2004 meningkat sebesar 91,03 % atau rata-rata meningkat 22,8 % per tahun sedangkan indeks harga barang yang dibayar petani pada periode yang sama meningkat sebesar 201,06 % atau meningkat rata-rata 50,06 % per tahun. Oleh karena laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih lambat dibanding laju peningkatan indeks harga yang dibayar maka nilai tukar petani mengalami penurunan sebesar 14,67 % pada periode tersebut atau rata-rata menurun 3,67 % per tahun. Hal ini berarti pada kondisi normal program pembangunan tahunan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat selama periode tersebut telah menurunkan status kemakmuran petani sebesar 3,67 % per tahun.

Informasi lengkap mengenai perubahan status kemakmuran petani yang diukur dengan menggunakan angka indeks nilai tukar petani (*farmer terms of trade*) selama periode 2000-2004 dapat dilihat pada lampiran tabel 2.

Di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan kabupaten dengan jumlah rumahtangga petani terbesar di Nusa Tenggara Barat angka indeks nilai tukar petani menurun sebesar 2,23 % pada periode tahun 2004-2005 sebagai akibat rendahnya kenaikan harga produk pertanian relatif terhadap kenaikan harga barang non pertanian. Pada periode tersebut harga barang yang dihasilkan petani meningkat 22,75 % sedangkan harga produk non pertanian yang diperlukan petani meningkat sebesar 59,95 % (Nuryanti, 2006).

Perubahan kemakmuran petani dengan *cash grant*

Sejak 1 Oktober 2005 pemerintah melakukan revisi model bantuan dengan mengurangi secara signifikan nilai subsidi terhadap harga BBM dan menggantikannya dengan *cash grant* (bantuan langsung tunai). Dengan *cash grant* rumahtangga miskin termasuk rumahtangga petani kecil dengan pendapatan per kapita kurang dari Rp. 150.000 per bulan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 100.000,- per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Tujuannya adalah untuk melindungi keluarga miskin dari dampak inflator sebagai akibat pengurangan jumlah subsidi yang sangat besar tersebut.

Pengurangan subsidi BBM semakin mendorong kenaikan harga barang dan jasa non pertanian. Di Kabupaten Lombok Timur, satu tahun sejak pengumuman

kenaikan harga BBM, harga barang non pertanian yang dibutuhkan petani meningkat sebesar 52,24 persen sedangkan harga barang produk pertanian yang dihasilkan meningkat 33,30 persen sehingga nilai tukar petani menurun sebesar 13,5 % (bandingkan dengan kondisi sebelumnya yang hanya menurun 2,23 %). Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada buruh tani. Upah buruh pertanian hanya meningkat 24,43 % sementara harga barang yang harus dibayar meningkat lebih tajam yaitu sebesar 58,32 persen. Oleh karena itu nilai tukar petani bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian (buruh tani) menurun sebesar 21,40 persen (Nuryanti, 2006).

Dari sisi pengeluaran, kenaikan harga BBM telah mempercepat laju kenaikan harga sehingga jumlah pengeluaran rumahtangga petani meningkat sebanyak Rp. 212.000,- per bulan yaitu dari Rp. 392.000,- menjadi Rp. 604.000,- per bulan sementara pengeluaran rumahtangga buruh tani meningkat Rp. 220.000,- per bulan yaitu dari Rp. 367.000,- menjadi Rp. 587.000,- per bulan. Oleh karena itu jika pemerintah ingin mempertahankan status kemakmuran rumahtangga petani kecil sebagai akibat pengurangan subsidi BBM maka nilai bantuan langsung tunai yang diberikan seharusnya minimal Rp. 200.000,- per bulan. Pemberian bantuan langsung tunai sebesar Rp. 100.000,- per bulan tidak dapat menutupi kenaikan pengeluaran rumahtangga petani sehingga pengalihan dari *excise subsidi* menjadi *cash grant* sebesar Rp. 100.000,- per bulan telah memperburuk tingkat kemakmuran petani.

Kesimpulan

Program pembangunan yang dilakukan sejak tahun 2000 hingga 2005 justru mengakibatkan status kemakmuran petani menurun sebesar 3,16 % per tahun untuk rumahtangga petani di Nusa Tenggara Barat dan 2,23 % untuk rumahtangga petani di Kabupaten Lombok Timur.

Pengalihan *excise subsidi* BBM yang dilakukan pemerintah pada tanggal 1 Oktober 2005 dan mengkompensasikannya dengan pemberian *cash grant* (bantuan langsung tunai, BLT) sebesar Rp. 100.000,- per bulan memberikan dampak berbeda dengan yang diharapkan. Kebijakan tersebut telah menurunkan status kemakmuran petani kecil terutama buruh tani.

Penghapusan subsidi BBM secara drastis telah memicu kenaikan harga barang non pertanian secara tajam sehingga berakibat kontra produktif bagi upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan terutama kemiskinan pada rumahtangga petani kecil di perdesaan.

Daftar pustaka

- Anonim, 2005. *Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program PKPS BBM Tahun 2005 oleh Perguruan Tinggi*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- BPS., 2001. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2001*. Badan Pusat Statistik Jakarta. Jakarta.

- BPS., 2005. *Laporan Sensus Rumah Tangga Miskin di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005*. BPS.Prop. NTB. Mataram.
- Browning, E.K., and J.M. Browning, 1992. *Microeconomic Theory and Applications*. 4th edition. Harper Collins Publishers, New York.
- Hanapih.T, 1981. *Strategi Kebutuhan Dasar Manusia: Suatu Tinjauan Terhadap Aspek Pemerataan dan Tata Ruang dalam Pembangunan*. Pusat Pengembangan Wilayah Pedesaan. Lembaga Pengabdian Masyarakat. IPB. Bogor.
- Nuryanti, 2006. *Perubahan Nilai Tukar Petani (NTP) Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi (unpublished). Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Pryitno.H, dan L. Arsyad, 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. BPFE.Yogyakarta.
- Rostiani.P, 1995. *Petani dan Keterkaitan Usaha*. Yayasan Akatiga. Bandung.
- Salim.E, 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Inti Indayu Press. Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah rumahtangga miskin yang dirinci menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Miskin
Lombok Barat	103.943
Lombok Tengah	115.422
Lombok Timur	125.745
Sumbawa	36.526
Dompu	27.071
Bima	43.641
Sumbawa Barat	7.278
Kota Mataram	17.741
Kota Bima	8.429

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat, 2005

Tabel 2. Indeks harga dan nilai tukar petani Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2000-2004

Tahun	Indeks harga yang diterima petani (%)	Indeks harga yang dibayar petani (%)	Nilai tukar Petani (%)
2000	327,28	375,55	87,17
2001	390,15	437,00	89,34
2002	461,19	537,55	85,74
2003	504,37	578,09	87,15
2004	418,31	576,61	72,50

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat, 2005